

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum ada beberapa tujuan dari pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengatur kembali kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan penduduk. Selain tujuan, pembangunan nasional juga memiliki sasaran. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang masih dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Berbagai macam upaya dan kebijakan telah dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Mulai dari lingkup daerah, regional, nasional, dan internasional. Masalah kemiskinan masih banyak ditemui di negara-negara berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi fokus pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan tetapi hal tersebut masih belum mampu mengatasi kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia sekarang ini telah menjadi suatu masalah nasional yang bahkan pemerintah pun tengah mengupayakan usaha pengentasan penduduk Indonesia dari masalah kemiskinan. Di Indonesia tingkat kesejahteraan

umum dapat diukur salah satunya dengan tingkat kemiskinan. Kesejahteraan umum dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang negatif. Sehingga semakin rendah tingkat kemiskinan, maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk (Yacoub, dalam Puspita, 2015).

Kemiskinan juga tidak luput melanda Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, padahal provinsi Jawa Tengah telah melakukan banyak perkembangan seperti pertumbuhan ekonomi maupun infrastruktur. Jumlah masyarakat miskin di Jawa Tengah pun terbesar kedua setelah Jawa Timur. Karena tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, pemerintah memberikan perhatian yang lebih untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah (Puspita, 2015).

Dalam delapan tahun terakhir, tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Berikut akan disajikan persentase penduduk miskin menurut provinsi di wilayah Jawa tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 1
Persentase Penduduk Miskin Di Pulau Jawa Tahun 2012-2017

Provinsi	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	3.70	3.70	4.09	3.39	3.75	3,78
Jawa Barat	9.88	9.61	9.18	9.53	8.77	7.83
Banten	5.71	5.71	5.51	5.90	5.36	5.39
Jawa Tengah	14.98	14.98	13.58	13.58	13.01	12.23
Jawa Timur	13.08	13.08	12.28	12.34	11.85	11.20
Yogyakarta	15.88	15.88	14.55	14.91	13.10	12.36

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dari keenam provinsi, Provinsi Jawa Tengah memiliki persentase jumlah penduduk miskin terbanyak ke-2 setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah penduduk miskin sebesar 12,23% pada tahun 2017. Kemudian diikuti Provinsi Jawa Timur sebesar 11,20%, lalu Provinsi Jawa Barat sebesar 7,83% dan Provinsi Banten sebesar 5,39%. Sedangkan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah adalah DKI Jakarta dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,78%. Secara keseluruhan, selama periode 2012 sampai 2017 tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Pada periode tahun 2012 sampai dengan 2017 persentase penduduk miskin mengalami penurunan.

Di provinsi Jawa Tengah penduduk yang tidak bekerja masih sangat tinggi. Tingginya angka tersebut sudah termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja. Hal tersebut sangat jelas dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Apabila tingkat pendidikan seseorang

semakin rendah, maka kesempatan untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan semakin kecil. Sehingga mereka tidak akan mendapatkan pendapatan yang layak dan tingkat kemiskinan semakin meningkat.

Berdasarkan tabel 1.1 Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Pulau Jawa pada periode 2012 sampai 2017. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah hampir tersebar ke seluruh kabupaten/ kota, hanya beberapa kabupaten/ kota besar saja yang tingkat kemiskinannya rendah. Di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2012 sampai 2017 jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017

Wilayah	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Cilacap	15.92	15.24	14.21	14.39	14.12	13.94
Kab. Banyumas	19.44	18.44	17.45	17.52	17.23	17.05
Kab. Purbalingga	21.19	20.53	19.75	19.70	18.98	18.80
Kab. Banjarnegara	18.87	18.71	17.77	18.37	17.46	17.21
Kab. Kebumen	22.40	21.32	20.50	20.44	19.86	19.60
Kab. Purworejo	16.32	15.44	14.41	14.27	13.91	13.81
Kab. Wonosobo	22.50	22.08	21.42	21.45	20.53	20.32
Kab. Magelang	13.97	13.96	12.98	13.07	12.67	12.42
Kab. Boyolali	13.88	13.27	12.36	12.45	12.09	11.96
Kab. Klaten	16.71	15.60	14.56	14.89	14.46	14.15
Kab. Sukoharjo	10.15	9.87	9.18	9.26	9.07	8.75
Kab. Wonogiri	14.67	14.02	13.09	12.98	13.12	12.90
Kab. Karanganyar	14.07	13.58	12.62	12.46	12.49	12.28
Kab. Sragen	16.72	15.93	14.87	14.86	14.38	14.02
Kab. Grobogan	16.13	14.87	13.86	13.68	13.57	13.27
Kab. Blora	15.10	14.64	13.66	13.52	13.33	13.04
Kab. Rembang	21.88	20.97	19.50	19.28	18.54	18.35

Kab. Pati	13.61	12.94	12.06	11.95	11.65	11.38
Kab. Kudus	8.63	8.62	7.99	7.73	7.65	7.59
Kab. Jepara	9.38	9.23	8.55	8.50	8.35	8.12
Kab. Demak	16.73	15.72	14.60	14.44	14.10	13.41
Kab. Semarang	9.40	8.51	8.05	8.15	7.99	7.78
Kab. Temanggung	12.32	12.42	11.55	11.76	11.60	11.46
Kab. Kendal	13.17	12.68	11.80	11.62	11.37	11.10
Kab. Batang	12.40	11.96	11.13	11.27	11.04	10.80
Kab. Pekalongan	13.85	13.51	12.57	12.84	12.90	12.61
Kab. Pemalang	19.27	19.27	18.44	18.30	17.58	17.37
Kab. Tegal	10.75	10.58	9.87	10.09	10.10	9.90
Kab. Brebes	21.12	20.82	20	19.79	19.47	19.14
Kota Magelang	10.31	9.80	9.14	9.05	8.79	8.75
Kota Surakarta	12	11.74	10.95	10.89	10.88	10.65
Kota Salatiga	7.11	6.40	5.93	5.80	5.24	5.07
Kota Semarang	5.13	5.25	5.04	4.97	4.85	4.62
Kota Pekalongan	9.47	8.26	8.02	8.09	7.92	7.47
Kota Tegal	10.04	8.84	8.54	8.26	8.20	8.11

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan tabel 2, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2012-2017 mengalami fluktuasi. Dari seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2017 adalah Kabupaten Wonosobo dengan jumlah penduduk miskin sebesar 20,32%, kemudian diikuti Kabupaten Kebumen dengan jumlah penduduk sebesar 19,60%, Kabupaten Brebes sebesar 19,14%. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk miskin terendah yakni Kabupaten Semarang dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,62%.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan salah satunya yaitu, jumlah penduduk. Jumlah penduduk di berbagai

wilayah atau daerah akan terus bertambah setiap tahun tergantung pada angka kelahirannya. Apabila jumlah penduduk terus bertambah besar dan tidak bisa dikendalikan dapat menjadi masalah bagi pemerintah karena akan meningkatkan angka kemiskinan. Namun, pertumbuhan penduduk juga dapat mengurangi angka kemiskinan apabila penduduk tersebut mampu mendapatkan pekerjaan yang bisa memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Tetapi sayangnya, pemerintah masih belum bisa memenuhi lapangan pekerjaan bagi para masyarakat apabila jumlah penduduk terlalu tinggi. Hal ini dapat terjadi karena setiap daerah mempunyai pertumbuhan pembangunan yang berbeda, ada yang mencapai pertumbuhan cepat adapula yang mencapai pertumbuhan lambat. Selain itu, kekayaan sumber-sumber yang dimiliki dan sarana prasarana daerah seperti sarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan lain-lain juga dapat berpengaruh bagi pertumbuhan suatu daerah. (Arifin, 2010 dalam Azizah dkk, 2018).

Selain jumlah penduduk, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu pendidikan. Dapat dikatakan jika pendidikan merupakan salah satu hal penting yang tidak bisa diabaikan. Karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi produktivitas seseorang untuk menghasilkan barang dan jasa. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi mempunyai gagasan yang baik dalam memproduksi barang dan jasa. Apabila gagasan tersebut diterima baik oleh masyarakat luas, maka semua orang bisa menggunakan gagasan tersebut

sebagai manfaat dari pendidikan. Sebagian besar orang setuju bahwa pendidikan merupakan aset untuk pembangunan di masa depan. Karena pendidikan berkaitan dengan pembangunan karakter masyarakat. Maka setiap masyarakat yang ingin sukses menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Karena pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mengurangi kebodohan dan kemiskinan (Aziz dkk, 2016).

Apabila dihubungkan dengan teori lingkaran setan versi Nurkse, bahwa keterbelakangan dan ketertinggalan adalah hal yang harus diatasi untuk mengurangi masalah kemiskinan yang terjadi. Keterbelakangan dan ketertinggalan tersebut bisa diatasi dengan meningkatkan pendidikan masyarakatnya. Karena pendidikan merupakan Human Capital, maka semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan meningkatkan produktivitas orang tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa. Sehingga pendapatan yang diterima akan meningkat, baik bagi individu maupun pendapatan nasional. Apabila pendapatan individu meningkat, maka tingkat konsumsi akan meningkat dan dapat melepaskan mereka dari kemiskinan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah tingkat kesehatan. Kesehatan adalah standar hidup minimum yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat. Karena dengan kesehatan masyarakat yang baik, akan berdampak dengan meningkatnya produktivitas masyarakat sehingga pendapatan yang didapatkan akan meningkat sejalan dengan perbaikan kesehatan di masyarakat. Kesehatan adalah salah

satu modal utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dimana kondisi kesehatan juga harus diperhatikan. Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia maka keduanya harus berjalan seimbang. Pembangunan kesehatan merupakan sebuah proses perubahan terhadap tingkat kesehatan sekelompok penduduk dari tingkat yang kurang baik menjadi tingkat yang lebih baik sesuai dengan standar kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan merupakan pembangunan yang dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia (Juanita dalam Jacobus, 2018).

Nurkse dalam teori lingkaran setan mengungkapkan bahwa produktivitas yang rendah merupakan faktor yang menyebabkan kemiskinan. Produktivitas yang rendah dapat disebabkan karena tingkat kesehatan yang rendah. Sehingga akan mengurangi etos kerja dan produktivitas seseorang. Akibatnya akan berdampak pada menurunnya pendapatan yang dapat menyebabkan seseorang rentan terhadap kemiskinan.

Selanjutnya ada pengangguran yang dapat mempengaruhi kemiskinan. pengangguran merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Pengangguran merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah kemiskinan (Sukirno,2006 dalam Ramdani, 2015). Pengangguran dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat dan akan

berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan. Apabila tingkat kesejahteraan masyarakat menurun akan memunculkan masalah lain yaitu kemiskinan yang akan bertambah (Sukirno, 2006: 87 dalam Agustina dkk, 2018).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pengeluaran pemerintah. Tahun ke tahun pemerintah telah mengeluarkan banyak anggaran untuk mengurangi jumlah pengeluaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia kecenderungannya meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa sebagian besar pengeluaran pemerintah yang dijadikan program pengentasan kemiskinan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. belanja untuk program kemiskinan terus bertambah belum menjadi ukuran prestasi. Pemborosan dana pemerintah yang sangat besar menjadikan beban negara semakin membengkak karena dana pemerintah tersebut dida[at dari dana pinjaman (Ramdani, 2015).

Faktor lain yang dapat menyebabkan pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia adalah alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan suatu daerah yang mempunyai hubungan negatif terhadap kemiskinan di daerah tersebut. Oleh sebab itu, diharapkan suatu daerah mempunyai nilai IPM yang tinggi yang biasanya diikuti oleh kualitas hidup masyarakat juga tinggi. Dengan kata lain, apabila nilai IPM suatu daerah tinggi, maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut seharusnya

rendah. Terdapat empat komponen dalam indeks pembangunan manusia, yaitu bidang kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup, bidang pendidikan yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, rata-rata besarnya pengeluaran perkapita untuk melihat kemampuan daya beli masyarakat yang dilihat dari pendekatan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam bidang pengembangan hidup layak (Alhudori, 2017).

Pada umumnya jumlah penduduk miskin akan terus bertambah apabila tidak ada solusi yang tepat dari pemerintah. Pulau Jawa sebagai wilayah terpadat di Indonesia pasti sangat sulit dalam mengatasi kemiskinan. Selain itu, pulau Jawa juga merupakan pulau dengan jumlah penduduk miskin terbesar sehingga pemerintah dari setiap provinsi harus secepat mungkin mencari solusi untuk menanggulangi masalah kemiskinan. (Djojohadikusumo, 1994 dalam Rizzal dkk, 2017).

Upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskina sangatlah serius, bahkan menjadi salah satu program utama, termasuk bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah. Terdapat dua poin penting yang menjadi fokus pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan. pertama adalah pada bidang pertanian yaitu dengan dilaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan Desa Berdikari yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun penduduk sekitar, bantuan keuangan ke pemerintah desa dan Desa Binaan. Kedua adalah pada bidang ekonomi yang produktif yaitu dengan

melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok dan bukan merupakan kegiatan simpan pinjam dan usaha dagang (mengambil margin laba). Poin arahan yang diberikan antara lain :

1. Diperlukannya komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan dengan berdikari/ mandiri
2. Hal yang harus menjadi yang utama adalah gotong-royong dalam masyarakat
3. Melakukan pemetaan untuk penanganan kemiskinan yang maksimal dan pengangguran di desa rawan kemiskinan
4. Bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin perlu dilakukan pembekalan keterampilan, permodalan dan pendampingan usaha
5. Revitalisasi pasar desa untuk pemasaran hasil usaha ekonomi produktif
6. Pembangunan infrastruktur untuk kelancaran arus distribusi barang/ jasa
7. Pengembangan usaha ekonomi produktif di desa perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait
8. Melakukan pendampingan pada usaha masyarakat secara nyata, seperti pemberdayaan pekarangan, kolam lele sederhana, posyandu)

Kegiatan diatas dianggap lebih strategis untuk dilaksanakan sebelum dilakukan pembahasan program atau kegiatan masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Provinsi Jawa Tengah sehingga dengan adanya kegiatan ini setiap SKPD dapat mengalokasikan program

atau kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan kemiskinan. (Bappeda Jawa Tengah, 2019)

Berdasarkan latar belakang diatas, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah penting di Provinsi Jawa Tengah. Belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ke seluruh kabupaten/ kota menjadi penyebabnya, padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bagi tiap kabupaten/ kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Lokasi yang menjadi tempat penelitian dibatasi pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah
2. Tahun penelitian dibatasi pada kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 2017
3. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan di Kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah dan variabel independen adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan angka harapan hidup.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
3. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, mengenai kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah dalam menentukan kebijakan guna

mengentaskan angka kemiskinan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

2. Dapat memberi masukan bagi Bappeda dan BPS sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan.
3. Sebagai referensi penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan kemiskinan.